

SENTERA

irasi Perubahan

TODAY



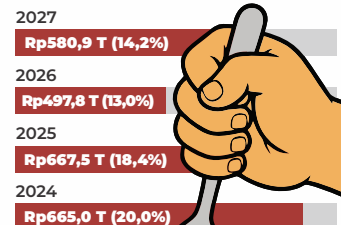
Tawa Usai Upacara

Presiden Prabowo Subianto terlihat tertawa bersama Wapres Gibran Rakabuming Raka dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Momen itu terjadi ketika Prabowo selesai memimpin upacara HUT ke-81 RI di Istana, Jakarta, Senin (17/8/2026). (tangkap layar YouTube Setpres)

MUMPUNG BELUM 2028, MBG 'MAKAN' SEPERTIGA DANA PENDIDIKAN

Bak memanfaatkan celah masa transisi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sebelum batas akhir 2028, pemerintah mengalokasikan Rp240 triliun dana pendidikan untuk program Makan Bergizi Gratis dalam RAPBN 2027. Angka itu 'memakan' hampir sepertiga (tepatnya 29,23 persen) dari total anggaran pendidikan Rp820,9 triliun. Kritikan pun mengalir. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), menyampaikan kekecewaannya terkait alokasi anggaran makan gratis yang diambil dari dana pendidikan. Konstruksi anggaran tersebut dinilai problematik. Pemerintah didesak agar tidak memelintir Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 40/PUU-XXIV/2026, yang menegaskan bahwa program makan bergizi bukanlah komponen utama pendidikan. Sehingga anggarannya harus dipisahkan dari operasional penyelenggaraan pendidikan. Artinya, meski MK memberikan batas transisi paling lambat pada APBN 2028, tapi secara eksplisit menyarankan agar pemisahan anggaran tersebut segera dilakukan. Di tengah pengelembungan anggaran ini, kasus keracunan massal di daerah justru memicu luapan amarah keluarga korban dan membongkar bobroknya tata kelola di lapangan. Fakta terbaru, BGN menemukan indikasi kelalaian dalam pengelolaan bahan baku ikan yang menyebabkan 353 siswa di Kabupaten Karo keracunan. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono sendiri mengakui telah menutup sekitar 1.300 dapur dalam waktu 3 pekan. Diketahui jumlah SPPG saat ini telah mencapai sekitar 27 ribu unit di berbagai daerah. BACA SELINGKAPNYA DI HAL 11....

ALOKASI APBN FUNGSI PENDIDIKAN MINUS MBG



RINGKASAN POSTUR APBN

Pendapatan Negara **Rp 3.426,0 Triliun** | Belanja Negara **Rp 4.097,2 Triliun** | Defisit APBN **Rp 671,2 Triliun**

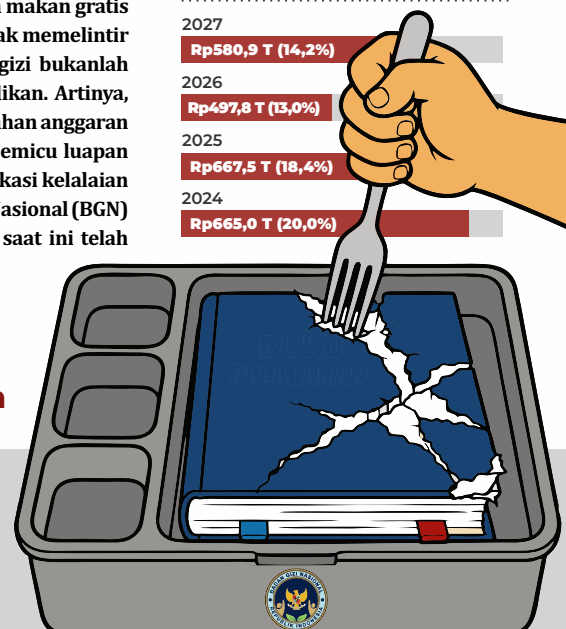
POS ANGGARAN PENDIDIKAN 2026 VS 2027

Tahun 2026 (Total Rp769,1 T)

MBG **Rp 229 T (29,8%)** | Pendidikan Lainnya **Rp 540,1 T (70,2%)**

Tahun 2027 (Total Rp820,9 T)

MBG **Rp 240 T (29,2%)** | Pendidikan Lainnya **Rp 580,9 T (70,8%)**



PEMERINTAH BELUM BUKA BANTUAN ASING UNTUK NTT

Pemerintah belum membuka opsi menerima bantuan dari negara lain untuk menangani dampak gempa bumi magnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Sabtu (15/8/2026). Istana menilai kebutuhan logistik dan pengungsian masih dapat ditangani dengan kapasitas nasional. Namun, di sejumlah wilayah terdampak, tantangan penanganan tidak semata soal ketersediaan bantuan. Akses menuju lokasi bencana menjadi persoalan tersendiri. Pulau Palue, Kabupaten Sikka, sempat terisolasi setelah jalan, listrik, dan jaringan komunikasi terganggu. Persediaan pangan warga juga dilaporkan mulai menipis.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah memantau penanganan bencana setiap hari berdasarkan laporan tim di lapangan.

"Belum ya. Nanti kita lihat karena berdasarkan laporan juga kami kebetulan lakukan setiap hari memonitor teman-teman di lapangan, semua masih bisa kita tangani dengan baik," kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/8/2026).

Menurut Prasetyo, kemampuan pemerintah saat ini mencakup kebutuhan logistik dan tempat pengungsian. Pemerintah juga mulai mengidentifikasi kebutuhan pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntau) bagi warga terdampak.

"Bahkan rencana-rencana untuk perbaikan, baik huntara maupun huntau, itu pun sudah dalam proses diidentifikasi," ujarnya.

Meski begitu, Prasetyo tidak menutup kemungkinan keputusan mengenai bantuan dari luar negeri berubah apabila kondisi di lapangan membutuhkan.

"Nanti kita lihat," katanya.

Pernyataan tersebut menunjukkan pemerintah belum menilai bantuan internasional sebagai kebutuhan pada fase penanganan saat ini. Namun, kebijakan itu tetap terbuka untuk dievaluasi berdasarkan perkembangan bencana.

Korban Meninggal 68 Orang

Skala bencana terlihat dari pembaruan data korban yang disampaikan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Plt Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan hingga Senin (17/8), jumlah korban meninggal dunia mencapai 68 orang. Sebanyak 213 orang lainnya mengalami luka-luka.

"68 jiwa yang meninggal," kata Berton dalam konferensi pers, Senin.

"Jumlah luka-luka saat ini ditemukan 213 jiwa," lanjutnya.

Data tersebut masih dapat berubah



Sejumlah bangunan mengalami kerusakan akibat gempa bumi di kawasan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT), Minggu (16/8/2026). (dok.ant)

karena proses pendataan dan verifikasi di lapangan terus berjalan.

BNPB juga mencatat gempa susulan masih terjadi setelah gempa utama. Hingga Senin, terdapat 1.576 gempa susulan. Sebagian besar tidak dirasakan masyarakat.

"Adapun perkembangan kegempaan saat ini, gempa susulan yang ada di catatan kami sudah sebesar 1.576," ujar Berton.

Dari jumlah tersebut, satu gempa susulan berkekuatan magnitudo 6,2. Tiga lainnya merupakan gempa berkekuatan kecil, sedangkan lebih dari 1.500 gempa susulan tidak dirasakan masyarakat.

BNPB menyatakan tidak lagi menerima laporan warga hilang hingga 17 Agustus. Meski demikian, personel Basarnas dan tim gabungan masih melakukan penyisiran untuk memastikan tidak ada korban yang terlewat.

"Hingga saat ini tanggal 17 Agustus sudah tidak ada lagi laporan warga hilang di wilayah terdampak. Meskipun tidak ada laporan tim gabungan Basarnas tetap melakukan upaya-upaya pencarian dan tetap menurunkan personel secara optimal di daerah-daerah terdampak," kata Berton.

Palue Sempat Terisolasi

Di tengah penanganan skala nasional tersebut, Pulau Palue di Kabupaten Sikka menghadapi

persoalan akses.

Camat Palue Rudolfus Riba mengatakan akses transportasi dan komunikasi menuju tujuh wilayah desa terputus setelah gempa. Kondisi tersebut membatasi mobilitas warga sekaligus distribusi bantuan.

"Seluruh ruas jalan yang menjadi akses masyarakat terputus total. Mobilitas masyarakat dan distribusi bantuan menjadi sangat terbatas," ujar Rudolfus.

Kerusakan juga terjadi pada rumah warga. Gangguan listrik membuat sebagian pengungsi harus bertahan tanpa penerangan yang memadai, sementara distribusi kebutuhan pokok dari luar wilayah tidak berjalan normal.

Berdasarkan pemantauan pada Minggu (16/8) malam, Rudolfus mengatakan persediaan makanan mulai menipis.

"Kebutuhan paling mendesak saat

ini adalah beras, makanan siap saji, air minum, makanan bayi/anak, tenda, terpal, serta kebutuhan dasar kelompok rentan," katanya.

Bupati Sikka Juventus Prima Yoris Kago yang meninjau langsung kondisi Palue mengatakan wilayah tersebut termasuk yang mengalami dampak berat.

"Di sini listrik lumpuh, telekomunikasi lumpuh, akses jalan tertutup longsor, ratusan rumah rusak, puluhan korban luka-luka. Sehingga memang membutuhkan tenda, sembako, obat-obatan dan tenaga medis," kata Juventus.

Rombongan pemerintah daerah bahkan harus menempuh perjalanan sekitar empat kilometer melalui medan yang sulit untuk mencapai lokasi terdampak.

"Kami bermalam di Nitung. Jalan sekitar empat kilometer kami tempuh dengan melawan maut," ujar Juventus.

Setelah melihat kondisi tersebut, Juventus mengatakan telah melaporkan situasi Palue kepada Kepala BNPB dan Gubernur NTT.

"Saya sudah laporkan kepada Kepala BNPB. Hari ini BNPB akan drop bantuan ke Palue sesuai yang dibutuhkan," katanya.

Ia juga meminta pembukaan akses jalan menjadi prioritas agar distribusi logistik dapat kembali berjalan.

"Puji Tuhan, setelah kami datang dan lihat langsung, semua kondisi memprihatinkan dan kami bisa pastikan Palue adalah wilayah yang paling terparah dengan gempa Sabtu lalu. Kami mohon atensi benar, minimal akses jalan dibuka dulu sehingga akses logistik bisa berjalan dengan normal," tegasnya.

Kondisi akses yang sulit tidak berarti bantuan berhenti. BNPB bersama tim gabungan pada Senin (17/8) menyalurkan bantuan logistik dan kebutuhan dasar ke Pulau Palue.

BNPB menyebut distribusi dilakukan melalui jalur laut dan udara untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan masyarakat di wilayah kepulauan tersebut. (tin,ist,kum,ant/dya)



Petugas medis memindahkan pasien ke tenda darurat di RSUD Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT), Minggu (16/8/2026). (Dok.ant)

MEGAWATI MINTA BPJS TAK DIUTAK-ATIK: TAMBAH ANGGARAN

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meminta pemerintah tidak mengutak-atik program BPJS Kesehatan. Ia justru meminta pemerintah menambah anggaran agar masyarakat tetap mendapat layanan kesehatan.

Megawati menyampaikan permintaan itu saat menjadi inspektur upacara HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Sekolah Partai DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (17/8/2026).

"Lah bayangkan sekarang, saya bikin, saya lho yang bikin BPJS. Tapi sekarang mulai dikutik-kutik seperti ini. Kenapa?" kata Megawati.

Ia lalu meminta Kementerian Kesehatan dan Kementerian Keuangan menjaga program tersebut.

"Tolong dengarkan ya, Kementerian Kesehatan dan lain sebagainya, [Kementerian] Keuangan, tolonglah BPJS itu tetap ada dan ditambahlah uangnya bagi rakyat banyak," ujarnya.

Megawati mengatakan gagasan jaminan kesehatan itu lahir dari pengalamannya melihat warga miskin kesulitan membayar biaya pengobatan.

"Saya nggak nyari nama, itu memang saya yang buat karena hati nurani saya. Saya sedih melihat rakyat itu menjual ini, menjual itu. Saya pernah melihat seorang ibu nangis di rumah sakit," katanya.

Menurut dia, pengalaman tersebut membuatnya melihat kesehatan dan pendidikan sebagai tanggung jawab negara.

"Coba bayangkan, dari situ saya bisa belajar harus ada yang namanya pemerintah itu juga memberikan bakti kepada rakyatnya bagi kesehatan dan pendidikan," sambungnya.

BPJS Hadapi Tekanan Keuangan

Permintaan Megawati muncul saat program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menghadapi tekanan keuangan.

Berdasarkan laporan keuangan 2025, Dana JKN mengalami defisit Rp17,13 triliun. Angka itu naik 123,8 persen dari defisit 2024 yang sebesar Rp7,66 triliun.

Pendapatan jasa kontrak jaminan sosial pada 2025 mencapai Rp176,72 triliun. Namun, beban jasa kontrak jaminan sosial mencapai Rp193,85 triliun.

Aset neto Dana JKN juga turun. Pada akhir 2025, nilainya Rp30,03 triliun. Setahun sebelumnya masih Rp48,79 triliun.

Tekanan itu terlihat dari rasio klaim. BPJS Kesehatan mencatat rasio klaim JKN mencapai 108 persen. Artinya, biaya klaim lebih besar daripada pendapatan iuran.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito mengatakan



Megawati memimpin upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (17/8/2026). (Ist)

kondisi tersebut perlu direspons dengan strategi jangka panjang. Fokusnya antara lain memperkuat pendanaan, mengendalikan biaya, dan menjaga mutu layanan.

Pada Juni 2026, Prihati juga mengungkapkan kebutuhan suntikan dana Rp20 triliun untuk menjaga keberlanjutan JKN. Dana tersebut dapat dicairkan setelah regulasi terkait ditandatangani.

Menurut Prihati, tanpa intervensi tambahan, BPJS Kesehatan diperkirakan hanya mampu bertahan sampai Juli 2027 sebelum menghadapi risiko gagal bayar. Dengan intervensi, keberlanjutan program dapat diperpanjang.

Tekanan keuangan BPJS tidak bisa dilepaskan dari besarnya cakupan JKN. Hingga akhir 2025, peserta JKN mencapai 282,7 juta orang atau 98,62 persen penduduk Indonesia. Sepanjang tahun yang sama, program ini mencatat lebih dari 725,3 juta pemanfaatan layanan kesehatan. Rata-ratanya lebih dari 1,9 juta layanan setiap hari.

Jumlah peserta terus bertambah. Data BPJS Kesehatan hingga 30 April 2026 mencatat 284.337.094 peserta. Program tersebut didukung 23.623 fasilitas kesehatan tingkat pertama dan 3.206 rumah sakit atau klinik utama.

Besarnya peserta membuat perubahan kebijakan BPJS langsung berdampak pada mayoritas penduduk.

Karena itu, persoalan JKN bukan sekadar soal neraca keuangan BPJS. Pemerintah juga harus menjaga agar peserta tetap mendapat layanan ketika membutuhkan pengobatan.

Iuran Tak Naik di 2027

Di tengah tekanan tersebut, pemerintah memastikan belum ada rencana menaikkan iuran BPJS

Kesehatan pada 2027.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemerintah akan membantu jika program JKN kembali mengalami defisit.

"Belum ada rencana untuk kenaikan BPJS (Kesehatan). Dan teman-teman nggak usah khawatir, kalau BPJS-nya defisit, pasti pemerintah pusatnya akan support," kata Budi dalam konferensi pers RAPBN 2027 dan Nota Keuangan, Jumat (14/8/2026).

Kebijakan itu membuat peserta tidak perlu menghadapi kenaikan iuran tahun depan. Namun, pemerintah tetap menghadapi pekerjaan rumah untuk menjaga kesehatan keuangan JKN.

Tingginya penggunaan layanan ikut menekan keuangan JKN. Sepanjang 2025, peserta memanfaatkan layanan kesehatan lebih dari 725,3 juta kali. Angka itu menunjukkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan semakin luas.

BPJS Kesehatan menyebut program JKN kini menjadi salah satu fondasi perlindungan kesehatan masyarakat. Prihati mengatakan program tersebut bukan hanya soal membayar biaya berobat.

"Program JKN bukan sekadar memberikan jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan, tetapi juga menjadi fondasi bagi terciptanya SDM Indonesia yang sehat, produktif, dan berdaya saing," ujar Prihati.

Karena itu, persoalan utama JKN bukan hanya mencari tambahan dana. Pemerintah juga perlu mengendalikan biaya layanan dan mendorong pencegahan penyakit.

BPJS Kesehatan sendiri telah memperkuat layanan preventif melalui skrining kesehatan. Langkah ini penting

RAPBN 2027 PRIORITASKAN PENGUATAN KESEHATAN

Fokus Utama

Penguatan Kesehatan

- Meningkatkan akses layanan kesehatan primer dan rujukan
- Membangun serta merevitalisasi fasilitas kesehatan di seluruh daerah
- Memperkuat laboratorium kesehatan masyarakat
- Memperbaiki pemerataan dan kualitas tenaga kesehatan

Intervensi Puskesmas

(Total 14.951 Proyek)

- 1.988 Puskesmas Baru
- 8.001 Renovasi Puskesmas Rusak Sedang
- 4.962 Proyek Pemenuhan Prasarana
- Prioritas pembangunan baru untuk kecamatan tanpa puskesmas, wilayah padat (>40.000 penduduk), dan fasilitas rusak berat

Penguatan RSUD (Total 409 RSUD)

- 402 RSUD: Pembangunan Gedung Pelayanan Medis / CMU
- 7 RS Baru (Bitung, Sumba Tengah, Pariaman, Ternate, Aceh Utara, Nias, Kab. Karo)
- 32 RS Jiwa: Pembangunan Gedung Pelayanan Medis

Proyek Labkesmas (Total 654 Proyek)

- 172 Labkesmas Baru
- 318 Renovasi Labkesmas
- 164 Pemenuhan Prasarana

Kebutuhan Tenaga Kesehatan

- Dokter Umum: Kurang 84.781 orang (di 474 Kabupaten/Kota)
- Dokter Gigi: Kurang 127.580 orang (di 505 Kabupaten/Kota)
- Dokter Spesialis: Kurang 55.712 orang (di 481 Kabupaten/Kota)
- Rasio dokter Indonesia saat ini: 0,6 per 1.000 penduduk



untuk menemukan risiko penyakit lebih awal sehingga biaya pengobatan berat bisa ditekan.

Pada saat yang sama, BPJS juga mempermudah peserta yang menunggak iuran melalui program Rehab 3.0. Peserta dapat mencicil tunggakan secara lebih fleksibel. (gus,rls,ant/dya)

WACANA PENGADILAN AD HOC BUMN PRABOWO

KPK: POSITIF, TAPI TUNGGU LANGKAH KONKRET

Presiden Prabowo Subianto membuka wacana pembentukan pengadilan ad hoc khusus untuk mengusut pengurus dan direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bermasalah hingga 30 tahun ke belakang. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambut gagasan tersebut secara positif, tetapi belum masuk ke tahap pembahasan.

Ketua KPK Setyo Budiyo mengatakan pemerintah sejauh ini baru menyampaikan wacana. Karena itu, KPK masih menunggu bentuk dan rencana tindak lanjut yang akan ditempuh pemerintah.

Setyo menyampaikan hal itu se usai mengikuti upacara peringatan HUT ke-81 RI di halaman Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (17/8/2026).

"Ya, tentu ini akan, kita belum masuk pada pembahasan apa yang dilakukan oleh pemerintah ya, baru pernyataan. Nanti action plan-nya seperti apa, ya tentu KPK akan melihat," kata Setyo.

Meski belum mengetahui bentuk kebijakannya, Setyo menilai gagasan tersebut memiliki sisi positif. Menurut dia, setiap kebijakan pemberantasan penyalahgunaan kekuasaan semestinya bermuara pada kepentingan masyarakat.

"Tapi pastinya mungkin kami melihat dalam sisi yang baik, dalam posisi pemikiran yang positif, bahwa rencana-rencana itu digunakan untuk bisa memberikan kembali kepada kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

KPK juga belum merinci jumlah BUMN yang tengah ditangani dalam perkara dugaan korupsi. Setyo mengatakan data tersebut harus terlebih dahulu diverifikasi melalui dokumen dan proses penanganan perkara.

"Kalau angkanya saya tentu enggak bisa kami sampaikan secara langsung. Karena kan datanya harus dilihat, dokumennya harus dilihat berapa BUMN yang sudah tertangani, gitu," kata Setyo.

Dia memastikan perkara BUMN yang memang mengandung unsur penyalahgunaan akan diproses sesuai kewenangan KPK. Perkembangan penanganannya, kata dia, dapat diketahui melalui pemberitaan maupun publikasi resmi lembaga antirasuah.

"Namun pastinya terhadap BUMN yang melakukan penyalahgunaan dan dalam proses, ya semuanya nanti bisa dilihat secara langsung baik itu pemberitaan di media maupun bisa dipublikasikan oleh Biro Humas," imbuhnya.

Terkejut Ada Ribuan BUMN

Wacana pengadilan ad hoc muncul



(Ilustrasi) Aksi unjuk rasa yang digelar Barisan Rakyat Sikat Koruptor (BRSK) di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Kamis (16/7/2026).dok

dalam pidato Prabowo pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPRD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Prabowo mengaku terkejut setelah mengetahui jumlah perusahaan dalam kelompok BUMN. Menurut dia, setelah Danantara dibentuk, terdapat sekitar 1.074 perusahaan dalam kelompok tersebut. Angka itu jauh di atas perkiraannya sebelum menjadi presiden, yakni sekitar 300-400 perusahaan.

Dalam kesempatan berbeda, pemerintah sebelumnya menggunakan angka 1.077 perusahaan dalam proses penataan dan konsolidasi BUMN. Danantara menargetkan jumlah entitas tersebut dipangkas menjadi sekitar 200-300 perusahaan.

Prabowo menilai struktur BUMN yang terlalu gemuk menjadi persoalan tersendiri. Ia juga menyoroti perusahaan negara yang dinilai tidak berjalan secara efisien dan tidak bertanggung jawab.

"BUMN-BUMN ini kadang-kadang bekerja seenaknya. Tidak bertanggung jawab kepada bangsa, kepada negara, pemerintah tidak dianggap. Saya tidak paham bagaimana bisa terjadi seperti ini," ujar Prabowo.

Karena itu, ia membuka kemungkinan pembentukan pengadilan khusus untuk menelusuri pengurus BUMN dari masa lalu.

"Mungkin harus kita bentuk suatu pengadilan ad hoc khusus untuk kita usut, untuk kita usut pengurus-

pengurus, direksi 30 tahun ke belakang mungkin," lanjutnya.

Namun Prabowo tidak hanya berbicara soal pemidanaan. Dia juga membuka kemungkinan mekanisme pengampunan bagi pengurus BUMN yang mengakui kesalahan dan bersedia memperbaiki keadaan.

"Tapi saya juga akan menghadap majelis, saya akan menghadap DPR, saya akan minta kalau perlu kita memberi juga peluang semacam amnesti khusus untuk mereka yang tobat, mereka yang sadar, mereka yang mengakui," kata Prabowo.

Dengan demikian, gagasan Presiden mencakup dua pendekatan: penegakan hukum terhadap dugaan penyimpangan masa lalu dan kemungkinan mekanisme pengampunan bagi pihak yang mengakui kesalahan.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan pemerintah belum sampai pada tahap pembahasan pembentukan pengadilan ad hoc BUMN.

Menurut Supratman, pernyataan Prabowo lebih tepat dibaca sebagai peringatan agar seluruh lembaga negara memperbaiki tata kelola dan mencegah korupsi.

"Karena itu sekali lagi, kalau beliau tadi bicara soal BUMN, soal inefisiensi, dan lain-lain sebagainya, itu hanya memberi pesan, hanya contoh," ujar Supratman.

Dia menegaskan belum ada pembahasan konkret mengenai

KASUS KORUPSI BESAR DI LINGKUNGAN BUMN

Pertamina

Minyak Mentah & Kilang

- Periode perkara: 2018-2023
- Diusut: 2025-2026
- Tersangka/terdakwa: M. Kerry Adrianto Riza, Riva Siahaan, Maya Kusmaya, dkk.

Pertamina-Telkom

Digitalisasi SPBU

- Periode perkara: 2018-2023
- Diusut: 2026
- Tersangka: Dian Rahmawan, Wiza Wer, Elvizar EL
- Kerugian: Rp322,18 miliar

PPA-BAS

Pembiayaan

- Periode perkara: 2026
- Diusut: 2026
- Tersangka: dalam penyidikan
- Kerugian: Rp38,8 miliar

Hutama Karya

Tol Padang-Pekanbaru

- Periode perkara: 2024-2025
- Diusut: 2024-2025
- Tersangka: 12 orang
- Kerugian: Rp27 miliar

PPI-Kemendag

Impor Gula

- Periode perkara: 2024-2025
- Diusut: 2024-2025
- Terdakwa: Thomas Trikasih Lembong (Tom Lembong)
- Kerugian: Rp400 miliar

PT AP

Ekspor CPO

- Periode perkara: 2024-2025
- Diusut: 2024-2025
- Tersangka: internal PT AP & pihak swasta
- Uang pengganti disita: Rp13,2 triliun

lembaga peradilan baru tersebut.

"Sampai hari ini belum ke sana, tapi itu warning. Warning dari Presiden kepada semuanya, bukan hanya kepada BUMN tapi kepada semua lembaga negara," kata Supratman.(gus,rls,tmp/dya)

KEKERASAN DI PAPUA SEJAK PEMERINTAHAN PRABOWO-GIBRAN

- **Juni 2025 — Yahukimo**
Anggota Kodim Yahukimo, Serka SM, tewas ditembak dan dibacok. Aparat menyebut pelaku KKB.
- **Oktober 2025 — Papua**
Dua prajurit TNI gugur dalam serangan kelompok bersenjata, termasuk Letda Fauzi Ahmad Sulkarnain.
- **Oktober 2025 — Intan Jaya**
Terjadi kontak tembak. TNI mengklaim 14 anggota OPM tewas, namun angka tersebut belum terverifikasi independen.
- **Januari 2026 — Tembagapura**
TNI mengevakuasi 18 pekerja Freeport yang dikepung kelompok bersenjata.
- **Februari 2026 — Yahukimo**
Pekerja konstruksi Daniel Datti tewas dalam serangan di sebuah sekolah.
- **Februari 2026 — Mimika & Nabire**
Serangan menewaskan pilot, kopilot, prajurit, dan petugas keamanan. Ratusan pekerja pertambangan dievakuasi.
- **Maret 2026 — Maybrat**
Serangan terhadap patroli Marinir menewaskan dua prajurit dan melukai satu lainnya.
- **17 Agustus 2026 — Jila, Mimika**
Kontak tembak kembali terjadi. Satu prajurit gugur dan dua lainnya terluka.



Dua Gejolak di Hari Kemerdekaan ACEH RICUH, PAPUA BAKU TEMBAK

Perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia berlangsung di tengah dua persoalan keamanan di wilayah yang memiliki sejarah konflik panjang. Di Aceh, peringatan 21 tahun perdamaian justru berujung keributan. Sementara di Papua Tengah, kontak tembak antara prajurit TNI dan kelompok kriminal bersenjata (KKB) menewaskan satu prajurit dan melukai dua lainnya. Dua peristiwa tersebut memiliki latar berbeda. Aceh berkaitan dengan persoalan simbol dan implementasi perdamaian pascakonflik. Papua menghadapi konflik bersenjata yang masih berlangsung.



Sekelompok orang mengibarkan bendera bulan dan bintang di acara zikir dan doa bersama di Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Sabtu (15/8/2026). ANTARA

Namun, penerapan ketentuan tersebut sejak 2013 masih menjadi persoalan antara Pemerintah Aceh dan pemerintah pusat.

Karena itu, Pemerintah Aceh dan DPRA kini meminta kepastian hukum kepada pemerintah pusat.

Juru Bicara Pemerintah Aceh Nurlis Effendi mengatakan pemerintah daerah dan DPRA akan berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri.

"Perlu keputusan dari Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kemendagri, apakah Bendera Bulan Bintang boleh dinaikkan atau tidak. Kalau boleh ya boleh dan kalau tidak ya tidak," kata Nurlis.

Forkopimda Aceh juga menghasilkan sejumlah rekomendasi. Di antaranya menjaga Aceh tetap aman dan kondusif, mencegah aksi serupa, mengutamakan pendekatan persuasif, serta memperkuat komunikasi dengan ulama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan unsur masyarakat lainnya.

Mereka juga menegaskan perdamaian Aceh sebagai fondasi bersama pembangunan daerah.

Kericuhan tersebut tidak membuat TNI melakukan penebalan pasukan. Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengatakan pengamanan di Aceh sudah berjalan.

"Kita sudah siapkan untuk mengatasi itu semua sudah berjalan. Semua bertanggung jawab secara hukum," kata Maruli di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/8/2026).

Maruli menilai situasi Aceh sudah terkendali. "Enggak ada masalah, kan mereka ada anak muda saja. Enggak enggak terlalu ini," ujarnya. TNI, kata dia, akan mendukung kepolisian dalam penegakan hukum.

"Ya kami mendukung kepolisian untuk bisa menegakkan hukum gitu," katanya.

Ketika ditanya mengenai penambahan personel, Maruli menjawab: "Enggak, enggak perlu (tambahan personel)."

Ia mengatakan telah mengecek kondisi tersebut kepada jajaran TNI di Aceh. "Baik, iya. Enggak perlu. Katanya saya sudah tanya sampai tadi pagi saya cek, Pangdam tidak perlu. Ya tetap dukung tugas kepolisian untuk bisa mengamankan wilayah," ujarnya.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga memastikan situasi Aceh telah terkendali.

"Beberapa kegiatan yang tentunya muncul di beberapa waktu terakhir di beberapa wilayah, seluruh jajaran tentunya sudah melaksanakan langkah-langkah dan saat ini situasinya seluruhnya sudah terkendali," kata Listyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (17/8/2026).

Listyo tidak memerinci langkah penanganan kepolisian maupun bentuk pengamanan khusus yang diterapkan. Polda Aceh sendiri telah memulai penyelidikan terhadap keributan tersebut.

Kericuhan ini mendapat perhatian dari Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla, yang ikut berperan dalam

proses perdamaian Aceh.

JK meminta masyarakat tidak membiarkan insiden tersebut mengganggu hasil perdamaian Helsinki yang telah berlangsung selama 21 tahun.

"Yang penting masyarakat memahami bahwa perdamaian telah membawa kemajuan dan kesejahteraan. Jangan sampai apa yang sudah dicapai selama 21 tahun ini terganggu," kata JK.

Pesan serupa disampaikan Juha Christensen, salah satu tokoh yang terlibat dalam proses perdamaian Aceh. Ia mengingatkan semua pihak agar tidak mengangkat isu sensitif yang dapat mengganggu suasana damai.

"Itu tidak bagus untuk suasana (kibarkan bendera GAM)," kata Juha.

Ia mengingatkan bahwa perdamaian harus dijaga oleh pemerintah maupun mantan GAM.

Aceh telah memiliki kerangka perdamaian yang formal. MoU Helsinki 2005 mengakhiri konflik bersenjata antara pemerintah Indonesia dan GAM. Karena itu, setiap penggunaan simbol yang berkaitan dengan sejarah konflik memiliki sensitivitas politik yang lebih besar.

Kericuhan 15 Agustus 2026 menjadi penting bukan semata karena bentrokan massa dan aparat. Persoalannya juga menyentuh pertanyaan lama: sejauh mana kekhususan Aceh dan hasil perdamaian Helsinki telah diterjemahkan ke dalam aturan yang dapat diterima semua pihak.

Pemerintah saat ini memilih jalur hukum dan dialog. TNI tidak menambah pasukan. Polisi menyelidiki keributan. Pemerintah Aceh dan DPRA meminta kepastian kepada Kemendagri mengenai Bendera Bulan Bintang.

Pemerintah pusat juga sedang mempercepat pembahasan revisi UU Pemerintahan Aceh. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta pembahasan tersebut dituntaskan pada 2026.

Pada hari yang sama, persoalan keamanan terjadi ribuan kilometer dari Banda Aceh.

Kontak tembak antara prajurit TNI dan KKB terjadi di Distrik Jila, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Senin (17/8/2026). (tin, ant, rls/dya)

Kabupaten Malang Tanggap Darurat Kekeringan hingga Akhir 2026: 12 Desa Terdampak

Pendistribusian air bersih di salah satu wilayah terdampak kekeringan musim kemarau 2026 di Kabupaten Malang. (foto: Pusdalops PB BPBD Kab. Malang)



MALANG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang menetapkan status tanggap darurat kekeringan hingga akhir 2026. Berdasarkan hasil monitoring dan survei kekeringan tahun ini, ada sekitar 12 desa di 5 kecamatan telah terdampak dan membutuhkan distribusi air bersih.

"Benar, sudah ditetapkan status tanggap darurat yang berlaku selama 151 hari, terhitung sejak 3 Agustus hingga 31 Desember 2026," ujar Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang,

Sadono Irawan, dikonfirmasi pada Senin (17/8/2026).

Diketahui, penetapan tersebut juga telah tertuang dalam Keputusan Bupati Malang Nomor 100.3.3.2/465/35.07.013/2026 tentang Status Tanggap Darurat Bencana Kekeringan serta Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Malang Tahun 2026.

Menurut Sadono, langkah ini diambil di tengah meningkatnya kewaspadaan terhadap dampak musim kemarau.

Berdasarkan surat Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait kewaspadaan menghadapi musim kemarau 2026, katanya, kekeringan meteorologis berpotensi diikuti berkurangnya persediaan air untuk kebutuhan rumah tangga, pertanian, dan air tanah.

"Kondisi tersebut juga dapat meningkatkan potensi kebakaran semak, hutan, lahan, hingga kawasan

perumahan," paparnya.

Lebih lanjut, Sadono menyebut berdasarkan dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten Malang 2021-2026, luas wilayah Kabupaten Malang yang memiliki risiko kekeringan mencapai 1.609,80 kilometer persegi atau sekitar 54,07 persen dari wilayah kabupaten. Dengan estimasi penduduk yang terpapar risiko kekeringan mencapai 532.762 jiwa.

Sementara untuk Karhutla, wilayah yang masuk kategori risiko mencapai 1.043,31 kilometer persegi atau 35,05 persen dengan estimasi penduduk terpapar sebanyak 692.739 jiwa.

"Tingkat risiko kekeringan berada pada kategori rendah hingga sedang, sedangkan risiko Karhutla berada pada rentang rendah hingga tinggi," ungkap Sadono.

Kondisi kekeringan juga telah teridentifikasi melalui hasil monitoring dan survei 2026. Sejumlah wilayah membutuhkan distribusi air bersih, di antaranya Desa Karangates di Kecamatan Sumberpucung sebanyak 365 kepala keluarga (KK), Desa Putukrejo dan Sumberpetung di Kecamatan

Kalipare masing-masing 426 KK dan 355 KK, Desa Sumberoto di Kecamatan Donomulyo sebanyak 125 KK, serta sejumlah desa di Kecamatan Sumbermanjing Wetan dan Gedangan.

"Salah satu faktor pemicu kekeringan adalah menurunnya debit dan volume sumber air, sumur, maupun PDAM," lanjut Sadono.

Sebagai upaya penanganan kekeringan di 12 desa tersebut, menurutnya telah dilakukan distribusi air bersih kepada wilayah terdampak. Salah satu distribusi yang tercatat telah berjalan dilakukan di Desa Sumberagung, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, dengan dukungan lembaga, relawan, dan PMI Kabupaten Malang.

Dirincinya, pada 8 Agustus 2026, distribusi air bersih sebanyak 15.000 liter dilakukan dari titik pengambilan air di Sumur Bor Desa Sitarjo. Distribusi menasar sejumlah RT di wilayah setempat.

Pada 9 Agustus, distribusi kembali dilakukan dengan volume 15.000 liter dan turut menasar SMPN 2 Sumbermanjing Wetan yang memiliki sekitar 650 siswa dan guru. (Santi/Dya)

Anggaran Pengelolaan Sampah Turun Kota Malang Hanya Bisa Tangani 120 Ton/Hari

MALANG - Rencana pengelolaan sampah melalui Local Service Delivery Project (LSDP) di Kota Malang mengalami penyesuaian. Setelah anggaran yang semula direncanakan sekitar Rp200 miliar kini turun menjadi sekitar Rp130 miliar. Penyesuaian dana tersebut berdampak pada target volume sampah yang akan ditangani, dari sebelumnya 150 ton menjadi sekitar 120 ton per hari.

"Tetapi kami masih bersyukur karena meskipun ada penyesuaian anggaran dari pusat, Kota Malang tetap masih di angka 10 besar. Harapannya nanti Kota Malang akan menjadi contoh untuk pelaksanaan LSDP tersebut," ujar Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang, Gamaliel Raymond Matondang, ditemui di Balai Kota Malang, Senin (17/8/2026).

Dikatakannya, tim dari Kemendagri dijadwalkan kembali melakukan penilaian terhadap Kota

Malang pada Rabu dan Kamis pekan ini.

Jika seluruh tahapan berjalan sesuai rencana, penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Wali Kota Malang dan Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri ditargetkan berlangsung pada Desember mendatang.

Seiring proses tersebut, Raymond mengatakan, DLH kini harus melakukan penyesuaian terhadap feasibility study (FS) atau studi kelayakan yang sebelumnya telah disusun pada 2023.

Menurut Raymond, FS sebelumnya hanya memuat rencana pembangunan fasilitas pengolahan sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST). Sementara dalam skema LSDP baru, Kemendagri meminta adanya pengembangan pengelolaan sampah yang mencakup TPST sekaligus Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle

(TPS3R).

"Karena FS yang kami buat waktu itu hanya untuk TPST. Sedangkan yang sekarang dari Depdagri minta selain TPST juga ada TPS3R," terang Raymond.

Dalam rencana terbaru, pembangunan TPS3R akan diarahkan ke Kelurahan Purwantoro. Sementara fasilitas TPST direncanakan tetap berada di kawasan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Supit Urang.

Penyesuaian tersebut juga berdampak terhadap kapasitas sampah yang dapat ditangani melalui program. Sebelumnya, rencana pengolahan sampah mencapai sekitar 150 ton per hari dengan estimasi anggaran Rp200 miliar.

Namun, setelah anggaran yang



Plt Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, Gamaliel Raymond Matondang. (Santi/Lentera)

direncanakan turun menjadi sekitar Rp130 miliar, kapasitas penanganan sampah ikut disesuaikan menjadi sekitar 120 ton per hari. Dari total tersebut, kata Raymond, sekitar 100 ton sampah per hari akan ditangani melalui TPST, sedangkan 20 ton per hari melalui TPS3R..(Santi/Dya)

DRONE IRAN **HANTAM** KANTOR PM KURDISTAN IRAK

Ketegangan antara Iran dan wilayah Kurdistan Irak kembali meningkat. Dua drone bermuatan bahan peledak yang diluncurkan dari wilayah Iran menargetkan kantor pribadi Perdana Menteri Kurdistan Irak Masrour Barzani dan kediaman kepala badan intelijen wilayah tersebut pada Senin (17/8/2026).



Foto dari Islamic Consultative Assembly News Agency (ICANA) ini memperlihatkan para anggota parlemen Iran berseragam Korps Garda Revolusi (IRGC) meneriakkan Matilah Amerika dalam pertemuan di Teheran, 1 Februari 2026. (ICANA NEWS AGENCY via AFP)

Direktorat Kontra-Terrorisme Kurdistan menyatakan serangan terjadi di wilayah Pirmam, Provinsi Erbil. Dua drone yang digunakan disebut berjenis Hadid-110. Tidak ada korban jiwa dalam serangan tersebut. Informasi itu juga dikonfirmasi oleh badan keamanan Pemerintah Regional Kurdistan (KRG) kepada Reuters.

Barzani menyebut serangan tersebut sebagai eskalasi berbahaya yang mengancam stabilitas wilayah semiotonom Kurdistan.

"Ini adalah eskalasi yang berbahaya dan ancaman langsung terhadap keamanan dan stabilitas wilayah Kurdistan."

Pernyataan itu disampaikan Barzani melalui akun media sosial X, setelah Unit Kontra-Terrorisme Kurdistan menyelidiki lokasi serangan.

Dalam pernyataan terpisah, Barzani mengancam serangan tersebut sebagai tindakan "sebrono dan tidak dapat diterima". Ia menegaskan serangan itu tidak akan menghentikan pemerintahannya menjalankan tugas dan melindungi warga.

Serangan terhadap kantor Barzani bukan kejadian tunggal. Sejak perang Iran-Amerika Serikat-Israel pecah pada akhir Februari 2026, wilayah Kurdistan Irak telah berulang kali

menjadi sasaran serangan drone dan rudal.

Direktorat Kontra-Terrorisme Kurdistan menyebut wilayah tersebut telah menghadapi lebih dari 1.000 serangan yang dilakukan Iran dan kelompok bersenjata pro-Iran di Irak.

Erbil menjadi salah satu titik paling rawan karena wilayah ini menjadi lokasi keberadaan pasukan Amerika Serikat, fasilitas diplomatik AS, perusahaan minyak asing, serta kelompok oposisi Iran yang berbasis di Irak.

Pada Jumat, 14 Agustus 2026, pasukan koalisi juga mencegat tiga drone bermuatan bahan peledak di atas Erbil. Serangan terbaru itu terjadi hanya beberapa hari sebelum drone kembali menasar fasilitas yang terkait dengan pimpinan Kurdistan.

Serangkaian serangan tersebut menunjukkan bahwa Kurdistan Irak semakin terseret ke dalam konflik yang lebih luas antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel.

Kurdistan Irak berada dalam posisi strategis. Wilayah tersebut berbatasan langsung dengan Iran dan selama bertahun-tahun menjadi salah satu pusat hubungan politik, keamanan, dan ekonomi Irak dengan Barat.

Wilayah itu juga menjadi tempat beroperasinya perusahaan energi internasional dan sejumlah fasilitas

militer serta diplomatik Amerika Serikat.

Al Jazeera melaporkan pada 11 Agustus bahwa konflik berkepanjangan telah memukul ekonomi Kurdistan. Pemerintah Regional Kurdistan menyebut 70 persen perdagangan wilayah tersebut terdampak akibat konflik regional.

Pada saat yang sama, keberadaan pasukan AS di Kurdistan menambah kerentanan wilayah tersebut. Associated Press melaporkan Amerika Serikat tetap berada di jalur untuk menyelesaikan penarikan pasukannya dari Irak pada 30 September 2026, sesuai kesepakatan sebelumnya dengan Baghdad.

Sebagian peralatan dari wilayah Erbil telah mulai ditarik.

Kondisi itu membuat serangan terhadap kantor Barzani memiliki dimensi lebih luas. Selain menasar pejabat tinggi Kurdistan, serangan tersebut memperlihatkan bahwa konflik Iran-AS dapat terus menjangkau wilayah Irak meski Washington mulai mengurangi kehadiran militernya.

Iran Perkuat Persiapan Perang

Serangan di Erbil terjadi ketika laporan mengenai persiapan Iran menghadapi konflik yang lebih besar kembali mencuat.

The Wall Street Journal melaporkan Iran menggunakan masa tenang setelah nota kesepahaman dengan Amerika Serikat pada Juni 2026 untuk memperkuat kemampuan militernya. Teheran disebut meningkatkan produksi rudal dan drone, memperkuat posisi Garda Revolusi Iran atau IRGC, serta meningkatkan koordinasi dengan kelompok-kelompok sekutunya di kawasan.

Laporan tersebut juga menyebut Iran menjalankan strategi dua jalur. Diplomasi dengan Washington tetap berlangsung, tetapi pada saat yang sama struktur keamanan dan militer Iran dipersiapkan untuk menghadapi kemungkinan perang yang lebih panjang.

Mengutip laporan The Wall Street Journal, menyebut pejabat intelijen Arab menemukan indikasi perubahan strategi di kalangan kelompok garis keras Iran. Mereka disebut berupaya memperluas konflik dan meningkatkan biaya yang harus ditanggung Amerika Serikat.

Iran juga dilaporkan memperkuat hubungan dengan kelompok bersenjata sekutu di Irak, Yaman, dan Lebanon. Para penasihat IRGC disebut dikirim ke sejumlah wilayah untuk mengoordinasikan operasi dengan kelompok-kelompok tersebut.

Sementara itu, Iran dilaporkan meningkatkan produksi rudal dan drone serta menempatkan persenjataan di kawasan yang menghadap Laut Merah. Langkah tersebut meningkatkan kekhawatiran negara-negara Teluk terhadap kemungkinan meluasnya konflik. (tin rtr,afp,ist/dya)

Asap membubung di atas Erbil, Irak, setelah sebuah ledakan. AFP





Cuaca Panas Tak Cuma Bikin Gerah, Pakar Ungkap Risiko Kesehatan Mental

Gelombang cuaca panas yang semakin sering terjadi akibat perubahan iklim ternyata tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik. Sejumlah penelitian terbaru menunjukkan suhu yang terlalu tinggi juga dapat memengaruhi kesehatan mental, kualitas tidur, produktivitas, hingga meningkatkan risiko berbagai penyakit serius.

Epidemiolog sekaligus pakar Global Health Security dari Griffith University dan Universitas YARSI, Dicky Budiman, mengatakan dampak cuaca panas ekstrem terhadap kesehatan masyarakat jauh lebih luas dibanding yang selama ini dipahami.

“Bukti terbaru menunjukkan hubungan antara paparan panas ekstrem dan peningkatan stres psikologis, gangguan tidur, depresi hingga penurunan produktivitas,” kata Dicky.

Pernyataan tersebut sejalan dengan sejumlah penelitian internasional yang menunjukkan suhu tinggi dapat memengaruhi kondisi psikologis seseorang. Analisis yang dipublikasikan dalam jurnal *The Lancet Planetary Health* menemukan peningkatan suhu lingkungan berkaitan dengan meningkatnya risiko gangguan kesehatan mental, kunjungan ke layanan kesehatan jiwa, hingga angka bunuh diri di sejumlah

negara.

Apa Hubungannya dengan Mental?

Saat cuaca sangat panas, tubuh bekerja lebih keras untuk menjaga suhu tetap normal. Kondisi ini dapat memicu stres fisiologis yang berdampak pada suasana hati, kualitas tidur, dan fungsi kognitif.

Tidur yang terganggu menjadi salah satu jalur utama yang menghubungkan cuaca panas dengan kesehatan mental.

Penelitian yang diterbitkan dalam jurnal *One Earth* menunjukkan malam yang lebih panas berhubungan dengan berkurangnya durasi tidur manusia. Dampak ini lebih besar pada kelompok lanjut usia dan masyarakat yang tinggal di negara berpenghasilan rendah.

Kurang tidur dalam jangka panjang diketahui berkaitan dengan peningkatan risiko depresi, kecemasan, gangguan konsentrasi, serta penurunan produktivitas.

“Bukti terbaru menunjukkan hubungan antara paparan panas ekstrem dan peningkatan stres psikologis, gangguan tidur, depresi hingga penurunan produktivitas,” ujar Dicky.

Selain itu, sejumlah studi internasional juga menemukan peningkatan suhu ekstrem dapat

berkorelasi dengan meningkatnya kunjungan ke unit gawat darurat terkait gangguan kesehatan mental.

DBD juga Diwaspadai

Di tengah meningkatnya suhu udara, masyarakat juga sering mengaitkan cuaca panas dengan lonjakan kasus demam berdarah dengue (DBD).

Namun menurut Dicky, hubungan tersebut tidak sesederhana itu. Ia menjelaskan peningkatan kasus DBD dipengaruhi banyak faktor, termasuk suhu, kelembapan, curah hujan, perilaku masyarakat, sanitasi lingkungan, kepadatan penduduk hingga efektivitas pengendalian vektor. Memang, suhu yang lebih hangat dapat mempercepat perkembangan larva nyamuk *Aedes aegypti*, meningkatkan metabolisme nyamuk dan mempercepat replikasi virus dengue.

Namun ketika suhu terlalu tinggi, kemampuan bertahan hidup nyamuk justru bisa menurun.

“Kalau dalam konteks Indonesia sering kali setelah hujan itu banyak genangan, kemudian beberapa minggu kemudian cuaca hangat. Di sinilah populasi nyamuk *Aedes* meningkat, kasus DBD meningkat.”

Penyakit Ginjal-Serangan Jantung

Dampak cuaca panas juga dapat menjalar ke berbagai organ tubuh. Dicky mengingatkan panas ekstrem meningkatkan risiko dehidrasi yang dapat memicu gangguan ginjal akut atau *acute kidney injury*.

“Penyakit katastrofik seperti ginjal dapat berisiko terjadi saat panas ekstrem karena adanya dehidrasi atau *acute kidney injury*,” ujarnya. Selain itu,

cuaca panas juga dapat meningkatkan risiko penyakit jantung dan stroke.

Gangguan Pernapasan

Masalah lain yang sering luput dari perhatian adalah kualitas udara. Menurut Dicky, cuaca panas kerap disertai peningkatan kadar ozon permukaan dan polusi udara yang dapat memperburuk gangguan pernapasan.

“Panas yang sering disertai ozon meningkat, polusi udara dan asap kendaraan akhirnya memperburuk asma,” katanya. WHO juga mencatat suhu tinggi dapat memperparah dampak polusi udara terhadap kesehatan manusia, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia dan penderita penyakit paru kronis.

Keracunan Makanan Meningkat

Cuaca panas ternyata tidak hanya memengaruhi tubuh secara langsung, tetapi juga keamanan pangan.

“Penyakit akibat makanan juga bisa meningkat karena cuaca panas ini, terutama temperatur tinggi mempercepat pertumbuhan bakteri seperti *salmonella* sehingga meningkatkan risiko keracunan makanan,” ungkap Dicky. Suhu tinggi memang menciptakan kondisi yang lebih ideal bagi pertumbuhan berbagai bakteri penyebab penyakit bawaan makanan (*foodborne disease*).

Karena itu, makanan yang disimpan terlalu lama pada suhu ruang lebih berisiko mengalami kontaminasi dibandingkan pada kondisi cuaca normal. Menurut Dicky, dampak cuaca panas ekstrem tidak berhenti pada persoalan kesehatan individu. (far/ist/dya)

Layak Ditiru, Korsel Lawan Panas Ekstrem dengan Hutan Kota



Kecerdasan buatan (AI) di China mulai memasuki wilayah yang selama ini dianggap sebagai panggung eksklusif manusia yaitu dunia hiburan.

AI bukan lagi sekadar digunakan untuk membantu menulis naskah, mengedit video, atau menghasilkan efek visual. Teknologi ini kini menciptakan pemeran utama, membangun persona di media sosial, mengumpulkan penggemar, hingga menerima tawaran endorsement. Salah satu fenomenanya adalah Fang Taozi, karakter perempuan berusia 20 tahun yang sepenuhnya dibuat menggunakan AI. Dalam waktu sekitar dua bulan, Fang berhasil mengumpulkan hampir 400.000 pengikut di media sosial.

Ia tampil sebagai perempuan



berambut hitam panjang yang membintangi drama pendek China. Salah satu serialnya, The Girl Who Got Laid Off, bahkan telah meraih lebih dari 200 juta penayangan di salah satu platform. Fang bukan sekadar karakter dalam drama. Ia kini diperlakukan layaknya selebritas sungguhan. Sejak akun media sosialnya dibuka pada pertengahan Juni, Fang telah mengunggah 43 video yang memperlihatkan aktivitas sehari-hari,

mulai dari memasak, berolahraga, hingga menghadiri acara mode di Paris.

Video-video itu secara keseluruhan mengumpulkan sekitar 28 juta tanda suka. Data yang dirilis media China pada Juli menunjukkan akun Fang telah memiliki lebih dari 334.000 pengikut dan 25,9 juta likes. Angkanya kemudian terus meningkat. (ECNS) Yang membuat fenomena Fang menarik bukan sekadar jumlah pengikutnya. Ia sengaja dibuat tidak sempurna.

Fang memiliki bintik hitam, pori-pori dan kerutan. Riasannya dapat terlihat luntur setelah seharian bekerja. Ketika menaiki tangga, keringat tampak membasahi wajahnya. Rambutnya bisa terlihat kusut dan pakaiannya meninggalkan bekas keringat.

Karakter seperti itu berbeda dari stereotip tokoh perempuan dalam banyak drama China yang sering ditampilkan sempurna, kuat dan sukses.

Fang justru diperlihatkan sebagai perempuan biasa. Ia bisa rapuh, melakukan kompromi, bahkan mengambil jalan pintas untuk bertahan hidup.

Di situlah kekuatan karakter AI tersebut. Penonton tidak hanya disuguhi sosok digital yang sempurna, tetapi figur yang sengaja

dirancang agar terlihat memiliki kelemahan seperti manusia.

Fenomena tersebut menunjukkan perubahan penting dalam industri hiburan: AI tidak lagi harus meniru manusia secara sempurna untuk mendapatkan perhatian. Ia cukup dibuat cukup manusiawi untuk membuat penonton merasa dekat.

Popularitas Fang kemudian bergerak keluar dari layar. Ia memiliki seorang asisten bernama Mimi yang juga mempunyai akun media sosial dengan sekitar 20.000 pengikut. Sementara pemeran kekasih Fang dalam drama, Zhou Yiheng, memiliki sekitar 130.000 pengikut. (farist/dya) Interaksi antara karakter-karakter digital tersebut bahkan dipasarkan seperti kehidupan selebritas sungguhan.

Popularitas Fang juga mulai menghasilkan uang.

Pada awal Agustus, ia tampil dalam video promosi produk lensa kontak berwarna. Sejumlah laporan industri bahkan menyebut tarif endorsement Fang mampu melampaui tarif sejumlah influencer manusia yang mempunyai sekitar 10 juta pengikut.

Artinya, nilai komersial seorang figur tidak lagi sepenuhnya ditentukan oleh keberadaan tubuh manusia. Bagi pengiklan, karakter AI memiliki sejumlah keunggulan. Mulai tidak menua, dapat tampil kapan saja, tidak memiliki tuntutan jadwal seperti manusia dan dapat diarahkan sesuai kebutuhan kampanye.

Seorang pengguna internet berkomentar bahwa Fang terlihat begitu nyata sehingga ia mulai percaya AI benar-benar dapat menggantikan aktor manusia. (farist/dya)



HARIAN
LENTERA
Inspirasi Perubahan
TODAY

HARIAN "LENTERA TODAY"
PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI
OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)
PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)
REDAKTUR LUTFIYU HANDI, ARIEF SUKAPUTRA, MUHIBUDIN KAMALI

KORAN DIGITAL LENTERA TODAY
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)
download edisi digital pada web
www.lenteratoday.com
VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS
803/DP-Verifikasi/K/X/2021



MEDIA TERVERIFIKASI

BIRO: SURABAYA: YOLANDA APRILLIA PRADITHA, AMANAH NUR ASIAH, JOKO PRASETYO | **SIDOARJO:** TEGUH A | **GRESIK:** ASEPTA YOGA P. (SERTIFIKASI WARTAWAN UTAMA) | **MOJOKERTO:** NUR HIDAYAH | **LAMONGAN:** L HANDI | **BLITAR:** ARIEF SUKAPUTRA | **KEDIRI:** AIS | **JOMBANG:** SUTONO | **PASURUAN-PROBOLINGGO-PONOROGO:** IMAN SANTOSO | **BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI:** PURCAHYONO JULIATMOKO | **MADIUN:** WIWIET EKO PRASETYO (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA) | **MALANG RAYA:** SANTI WAHYU SANIA (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA), ISKANDAR Z. | **TRENGGALEK:** HERLAMBAANG | **MADURA RAYA:** SAHLAN KURNIAWAN | **NGAWI:** DIMAS RIDHO SURYO BASKORO | **DKI JAKARTA:** FUAD HASSAN | **LOMBOK BARAT:** MUHAYYAN | **PALANGKA RAYA:** NOVITA MASNIARI

PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH | **MARKETING COMMUNICATION** JOKO PRASETYO UTOMO, ISKANDAR ZULKARNAIN | **SEKERTARIS** FITRIYANTI SUTAN, FARADITA NUR FADHILA
DESAIN GRAFIS PAULUS IVAN, FADHILA | **ALAMAT REDAKSI** JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26, JL TENGGILIS TENGAH 4 | **TELP** 03187854491 | **PENERBIT** PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA | **ALAMAT PERCETAKAN** SMILE GRAFIKA JL. RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA | **TELP IKLAN** 031-87854491 | **NIB** 91205006801134 | **HARGA IKLAN** RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal wartawan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal wartawan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

Ruang Nyaman Menelusuri Islam Nusantara di MINHA

Menjelang Mukhtar Nahdlatul Ulama (NU), perhatian kembali tertuju pada Tebuireng, Jombang, salah satu kawasan yang lekat dengan sejarah perjalanan NU dan tradisi pesantren di Indonesia. Di kompleks Pesantren Tebuireng, Museum Islam Indonesia K.H. Hasyim Asy'ari (MINHA) menawarkan cara lain untuk membaca sejarah yaitu melalui manuskrip, benda pribadi ulama, artefak dakwah, hingga jejak perjuangan mempertahankan kemerdekaan.

Museum itu tidak menyambut pengunjung dengan denting dramatis atau instalasi yang mencolok. Begitu melewati pintu utama, perhatian justru tertuju pada sosok kuda berwarna tembaga yang merepresentasikan kuda Pangeran Diponegoro.

Patung tersebut seolah menjadi penanda awal perjalanan di MINHA. Kisah yang dibangun museum ini tidak berhenti pada perkembangan Islam sebagai agama, tetapi juga memperlihatkan bagaimana ulama, pesantren, dan masyarakat Muslim berkelindan dengan sejarah perjuangan bangsa.

MINHA diresmikan Presiden Joko Widodo pada 2018. Setelah beberapa tahun beroperasi, museum terus berbenah. Wajah terbarunya rampung pada akhir 2025 melalui pembaruan ruang pameran sekaligus penguatan narasi koleksi.

Penanggung jawab unit MINHA, Mujibur Rohman, mengatakan pembaruan museum diarahkan untuk membuat pengunjung memahami hubungan antara benda yang dipamerkan dan konteks sejarah di baliknya.

"Kami ingin pengunjung tidak sekadar melihat benda, tetapi memahami konteks sejarahnya. Setiap ruangan kami tata sebagai bab dalam perjalanan panjang Islam dan bangsa ini," ujar Mujibur.

Membaca Sejarah dari Empat Zona

Ruang pameran MINHA kini ditata dalam empat zona tematik. Narasinya bergerak dari sejarah penyebaran Islam di Nusantara, perkembangan pesantren, peran ulama, hingga kontribusi umat Islam dalam perjuangan kemerdekaan dan pembangunan bangsa.

Dari ruang pembuka, pengunjung diarahkan menuju dua ruang tokoh sentral: Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dan K.H. Hasyim Asy'ari.

Ruang Abdurrahman Wahid tampil dengan suasana lebih kontemporer. Linimasa kehidupan Gus Dur, dokumentasi kebijakan, aktivitas intelektual, dan sejumlah memorabilia disusun untuk memperlihatkan perjalanan pemikiran tokoh yang pernah menjadi Presiden keempat Indonesia tersebut.

Salah satu benda yang mencuri perhatian adalah barongsai yang digunakan untuk menyambut Gus Dur setelah pemerintah mengizinkan kembali perayaan Imlek dan pertunjukan barongsai. Peristiwa itu berlangsung pada 2000.

Koleksi tersebut bukan sekadar memorabilia. Ia ditempatkan sebagai bagian dari narasi mengenai gagasan kebangsaan, toleransi, dan penghormatan terhadap keberagaman yang menjadi bagian penting dari pemikiran Gus Dur.

Di ruang berikutnya, pengunjung memasuki dunia K.H. Hasyim Asy'ari, pendiri Pesantren Tebuireng sekaligus salah satu ulama penting dalam sejarah Islam Indonesia.

Foto-foto perjuangan, reproduksi dokumen Resolusi Jihad, serta berbagai arsip masa revolusi memenuhi ruang pameran. Sebuah kitab terbuka ditempatkan di dalam vitrin kaca di tengah ruangan, seperti

mengingat bahwa ilmu pengetahuan menjadi salah satu fondasi utama perjuangan.

Koleksi yang berkaitan langsung dengan Mbah Hasyim juga dipamerkan, antara lain jubah asli, tongkat kayu dan tasbih. Manuskrip serta kitab kuno koleksi Tebuireng ditempatkan dalam vitrin dengan pengaturan suhu khusus untuk menjaga kondisinya.

Panel digital melengkapi koleksi fisik. Pengunjung dapat membaca ringkasan isi kitab dan mengenali biografi sejumlah ulama Nusantara. Majalah-majalah Islam yang terbit pada awal abad ke-20 juga memperlihatkan bagaimana gagasan keagamaan berkembang dan diperdebatkan pada masa itu.

Di ruang yang sama, kisah Wahid Hasyim turut ditampilkan. Putra K.H. Hasyim Asy'ari itu memiliki peran dalam merumuskan kebijakan keagamaan pada masa awal Republik Indonesia.

Bagi pengelola, narasi tersebut penting untuk menunjukkan bahwa pesantren tidak hanya menjadi tempat pendidikan agama. "Di pesantren, agama dan cinta tanah air tumbuh bersamaan. Itu yang ingin kami tegaskan dalam narasi ruang ini," kata Mujibur.

Beduk, Tradisi, dan Kehidupan Pesantren

Di bagian lain museum, sebuah beduk besar menarik perhatian. Beduk Ijo Mangusari menyimpan jejak kehidupan spiritual sekaligus sosial masyarakat setempat. Warna hijau menjadi identitas khas. Dahulu, suara beduk tidak hanya menjadi penanda waktu salat, tetapi juga bagian dari kehidupan bersama: mengumpulkan warga

untuk beribadah, bermusyawarah, hingga merayakan hari-hari besar keagamaan.

Artefak seperti ini memperlihatkan pendekatan MINHA dalam menyusun koleksi. Sejarah Islam tidak hanya dipahami melalui tokoh besar dan dokumen penting, tetapi juga melalui benda yang pernah hidup di tengah masyarakat.

Memasuki lantai kedua, narasi bergeser lebih jauh ke belakang, menuju sejarah kedatangan dan perkembangan Islam di Nusantara.

Panel kronologis menjelaskan sejumlah teori mengenai masuknya Islam, termasuk jalur perdagangan yang menghubungkan Nusantara dengan Gujarat, Persia dan Arab. Peta interaktif memperlihatkan jalur maritim yang menjadi salah satu pintu penting pertemuan masyarakat Nusantara dengan dunia Islam. (dya)



Mumpung Belum 2028, ...dari Hal 1

Pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp820,9 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Angka ini merupakan bagian dari total pagu anggaran belanja negara untuk sektor pendidikan, perlindungan sosial, dan ketahanan pangan yang mencapai Rp1.566 triliun. Namun, di balik besarnya postur anggaran tersebut, tersimpan siasat redistribusi yang menggerus porsi utama sektor pendidikan. Dari total dana pendidikan Rp820,9 triliun tersebut, sebesar Rp240 triliun atau setara 29,23 persen, disalurkan khusus untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan target sasaran 60,6 juta penerima manfaat.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan rincian alokasi tersebut saat memimpin konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027 di Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026.

"Sekitar Rp240 triliun untuk MBG," kata Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Namun, status angka Rp240 triliun tersebut perlu ditegaskan sebagai alokasi dalam usulan RAPBN 2027, bukan angka final APBN 2027 karena masih harus melalui proses pembahasan teknis bersama DPR RI.

Penyatuan anggaran MBG ke dalam postur pendidikan ini memanfaatkan celah masa transisi dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 40/PUU-XXIV/2026 yang dibacakan pada 30 Juli 2026. MK mengabulkan sebagian permohonan pengujian terhadap Penjelasan Pasal 22 ayat (3) UU Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026. Dalam amar putusannya, MK menyatakan ketentuan yang memasukkan program makan bergizi dalam pendanaan operasional pendidikan hanya berlaku sah untuk APBN 2026. Untuk APBN tahun-tahun berikutnya, anggaran MBG yang bukan komponen utama pendidikan harus dipisahkan dari anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan, dengan batas waktu pemisahan paling lambat pada APBN 2028.

Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menjelaskan bahwa alokasi anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen APBN ditujukan khusus untuk memenuhi pembiayaan komponen utama pendidikan, seperti peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, kurikulum, serta evaluasi dan pengembangan pendidikan.

"Pembiayaan atas komponen utama tersebut, tidak termasuk pembiayaan untuk program MBG," kata Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih saat membacakan pertimbangan putusan MK di Jakarta, Kamis (30/7/2026).



Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menerima ompreng Makan Bergizi Gratis (MBG) dari Badan Gizi Nasional (BGN) dalam Pesta Rakyat di Lapangan Monas, Jakarta, Senin (17/8/2026) malam. (Setpres)

Langkah pemerintah menaruh beban MBG pada pos pendidikan RAPBN 2027 memicu gelombang kritik tajam dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI). Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, menilai pemerintah semestinya mulai memisahkan anggaran MBG dari pendidikan sejak APBN 2027 dan tidak mengulur waktu hingga batas akhir.

"Pemerintah jangan memelintir putusan MK. Tahun 2028 itu batas terakhir untuk patuh, bukan izin untuk terus menggerogoti anggaran pendidikan sampai 2027. Kalau pemerintah bisa memisahkannya sekarang, mengapa harus menunggu sampai batas terakhir?" kata Ubaid Matraji, Senin, 17 Agustus 2026.

"Tenggat tersebut tidak boleh dijadikan dalih untuk mempertahankan praktik lama, apalagi memperbesar jumlah dana pendidikan yang digunakan untuk MBG," tegas Ubaid.

Pemerintah membela pengalokasian ini sebagai bagian dari agenda pembangunan manusia. Purbaya Yudhi Sadewa memaparkan bahwa anggaran pendidikan 2027 tetap mencakup berbagai kebutuhan mendasar. Di antaranya alokasi untuk Program Indonesia Pintar (PIP) bagi 22,1 juta siswa, Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah untuk 1,1 juta mahasiswa, serta tunjangan profesi bagi 1,7 juta guru ASN daerah dan tunjangan tambahan bagi 20,7 ribu guru ASN daerah.

Pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk pembangunan tujuh Sekolah Unggul Garuda, renovasi 12.215 sekolah dan madrasah, pembangunan 100 Sekolah Rakyat, serta operasional 166 Sekolah Rakyat. Dukungan lainnya mencakup Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk 54,2 juta siswa, Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD bagi 6,3 juta peserta didik, operasional 148 museum dan taman budaya, serta pendanaan Beasiswa LPDP.

DPR RI kini menghadapi persoalan sumber dana alternatif dalam pembahasan RAPBN 2027. Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menyatakan bahwa pemerintah perlu menyiapkan skema pendanaan di luar pos pendidikan jika

MBG digeser.

"Hal ini tentu menjadi perhatian kami. DPR RI bersama pemerintah akan membahas alokasi anggaran tersebut hingga tercapai kesepakatan mengenai pagu definitif RAPBN Tahun Anggaran 2027," kata Hetifah Sjaifudian.

Kendati struktur anggaran memicu perdebatan, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa MBG tetap berlanjut. Dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD di Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026, Presiden menegaskan komitmennya:

"Kita tidak boleh menerima satu dari empat anak Indonesia mengalami stunting. Kita tidak boleh menerima itu dan karena itu saya bertekad meneruskan Program MBG, tapi dengan perbaikan, dengan efisiensi," ujar Presiden Prabowo Subianto, Jumat, 14 Agustus 2026.

Rentetan Keracunan

Di saat pemerintah sibuk memperjuangkan angka Rp240 triliun di dalam APBN, ujian berat justru menghantam kepemimpinan baru Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono. Laporan kasus keracunan pangan yang berulang di tingkat sekolah membongkar rentannya pengawasan mutu makanan dalam skala masif.

Salah satu insiden paling menonjol terjadi di SMKN 6 Semarang, Jawa Tengah. Dinas Kesehatan Kota Semarang mencatat sebanyak 707 orang, terdiri dari 693 siswa dan 14 guru, mengalami gejala pusing, mual, dan muntah usai menyantap jatah makanan MBG. Tim kesehatan langsung melakukan penanganan awal sebagai dugaan keracunan serta menguji laboratorium sampel makanan. Evaluasi terhadap SPPG penyedia di Semarang menemukan fakta mengejutkan: dari 19 Standar Operasional Prosedur (SOP) keamanan pangan yang diwajibkan, pengelola dapur hanya mematuhi 3 SOP, sementara 16 SOP lainnya diabaikan begitu saja.

Gelombang kasus keracunan kemudian meluas hingga ke Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mengungkapkan bahwa ratusan anak menjadi korban akibat ketiadaan kontrol kualitas di tingkat dapur.

"Ada 353 murid yang mengalami

**ASUMSI DASAR
EKONOMI MAKRO**

Pertumbuhan Ekonomi (%)

- Realisasi Semester I-2026: 5,45
- APBN 2026: 5,40
- RAPBN 2027: 6,00

Inflasi (%)

- Realisasi Semester I-2026: 2,88
- APBN 2026: 2,50
- RAPBN 2027: 2,50

Suku Bunga SBN 10 Tahun (%)

- Realisasi Semester I-2026: 7,2
- APBN 2026: 6,90
- RAPBN 2027: 6,90

Nilai Tukar (Rp/US\$)

- Realisasi Semester I-2026: 17.815
- APBN 2026: 16.500
- RAPBN 2027: 17.500

**Harga Minyak Mentah
Indonesia/ICP (US\$/barel)**

- Realisasi Semester I-2026: 81,68
- APBN 2026: 70
- RAPBN 2027: 75

Lifting Minyak Mentah (BPOD)

- Realisasi Semester I-2026: 576,2
- APBN 2026: 610
- RAPBN 2027: 610

Lifting Gas Bumi (RBSMPH)

- Realisasi Semester I-2026: 909
- APBN 2026: 984
- RAPBN 2027: 954



dugaan keracunan setelah mengonsumsi makanan MBG. Peristiwa ini sangat fatal dan berdampak kepada anak-anak," ujar Bobby Nasution, Jumat (14/8/2026).

Merespons insiden fatal di Karo, Kepala BGN Sudaryono mendatangi RS Haji Medan pada Minggu, 16 Agustus 2026, untuk memantau langsung korban yang terpaksa masuk ruang ICU anak.

"Saya sudah lihat kondisinya, sudah hari ketiga di ICU anak. Kondisi yang kami terima menurut laporan dokter yang merawatnya, kondisinya sudah berangsur membaik," kata Sudaryono usai menjenguk korban di RS Haji Medan, Minggu (16/8/2026).

Pemeriksaan awal BGN mengindikasikan adanya kelalaian fatal dalam penanganan bahan baku makanan di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Karo. Sudaryono membeberkan bahwa ratusan ekor ikan basah dibiarkan membusuk tanpa masuk mesin pendingin. (wid,rls,kcm,tir/dya)



DPRD JATIM TEKANKAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN DAN PENGUATAN EKONOMI RAKYAT



Pimpinan DPRD Jawa Timur bersama Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur dalam Rapat Paripurna Istimewa (14/08/2026)

SURABAYA - DPRD Jawa Timur menekankan pentingnya memastikan arah pembangunan dan program pemerintah benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat. Pesan tersebut mengemuka dari jajaran DPRD Jatim setelah mengikuti Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI pada HUT ke-81 Kemerdekaan RI, Jumat (14/8/2026).

Ketua DPRD Jatim, M. Musyafak Rouf, mengungkapkan momentum kemerdekaan harus menjadi pengingat agar pembangunan daerah tetap berpihak pada kepentingan publik dan keadilan sosial," ungkap Musyafak.

"Menjelang usia ke-81 tahun Indonesia merdeka, arah pembangunan di daerah dituntut untuk terus berpihak pada kepentingan publik dan keadilan sosial," ungkap Musyafak.

Menurutnya, peringatan HUT Kemerdekaan juga menjadi momentum memperkuat komitmen bersama dalam mengarahkan pembangunan agar mengabdikan kepada masyarakat.

"Memperkokoh persatuan serta menegaskan prinsip keadilan sosial bagi seluruh masyarakat," tegas Musyafak.

Musyafak menjelaskan, tema HUT ke-81 Kemerdekaan RI, yakni Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur, perlu diterjemahkan dalam

pembangunan di tingkat daerah. Menurutnya, prinsip adil harus memastikan hasil pembangunan dan peningkatan kesejahteraan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat.

"Dan makmur pada akhirnya merupakan muara dari kedaulatan dan keadilan, di mana masyarakat mencapai tingkat kesejahteraan lahir dan batin yang tinggi, berkelanjutan, serta terbebas dari kemiskinan dan kelaparan," terangnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jatim, Deni Wicaksono, menekankan pentingnya mengukur keberhasilan program pemerintah berdasarkan kondisi nyata masyarakat. Menurutnya, capaian program tidak cukup hanya dilihat dari besarnya angka yang disampaikan pemerintah.

"Secara angka memang luar biasa kalau kita lihat dan saksikan bersama tadi. Tapi kita perlu juga melihat kondisi real di lapangan," ungkap Deni.

Deni mencontohkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang memiliki anggaran besar. Menurutnya, pelaksanaan program tersebut tetap membutuhkan pengawasan, terutama terkait kualitas dan keamanan pangan.

Ia menyoroti masih adanya kasus penerima MBG yang mengalami keracunan, termasuk kejadian di Jawa Timur. Menurutnya, persoalan tersebut perlu menjadi bahan evaluasi agar program prioritas pemerintah

benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat.

"Kami berharap memang ada tindakan tegas agar program yang menjadi program prioritas ini bisa berjalan baik, capaian juga maksimal," ujarnya.

Deni bahkan meminta SPPG atau dapur MBG yang terbukti melakukan kesalahan hingga menyebabkan keracunan ditutup sementara. Jika setelah evaluasi tidak terdapat perbaikan, pemerintah dinilai perlu mengambil langkah lebih tegas.

"Kalau memang tidak bisa memperbaiki diri, bisa ditutup selamanya, dicabut izinnya," tegasnya.

Selain MBG, Deni menilai pelaksanaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) juga perlu dilihat dari manfaat ekonominya bagi masyarakat. Menurutnya, ukuran keberhasilan tidak cukup berdasarkan jumlah koperasi yang telah dibangun.

"Berapa sih KDMP yang sudah terbangun, berapa yang kemudian sudah bisa beroperasi? Kemudian mungkin kan targetnya memang ada tambahan pendapatan atau profit. Jadi coba dikalkulasi kira-kira sejauh ini sudah berapa persen yang berjalan dan profit yang didapatkan sebesar apa," ujarnya.

Deni mengingatkan pembangunan KDMP berkaitan dengan kepentingan masyarakat desa karena

menggunakan skema dana desa yang harus diangsur selama enam tahun. Karena itu, perkembangan dan hasil program perlu dibuka secara transparan untuk melihat manfaat ekonominya.

"Kalau melihat angka-angka tadi luar biasa capaiannya. Tapi apakah ini real dengan yang terjadi di bawah, di masyarakat, itu yang memang kita serahkan kepada masyarakat Indonesia, khususnya Jawa Timur," katanya.

Lebih lanjut, Anggota Komisi B DPRD Jatim, Ro'aitu Nafif Laha, menilai penguatan ekonomi kerakyatan perlu menjadi bagian penting dalam penerjemahan kebijakan pemerintah di daerah.

Nafif mengatakan, swasembada pangan, hilirisasi, dan perlindungan sektor riil relevan dengan kebutuhan Jawa Timur, terutama dalam menjaga stabilitas ekonomi.

"Penekanan Presiden Prabowo mengenai pentingnya swasembada pangan, hilirisasi, serta perlindungan terhadap sektor riil sangat relevan dengan kondisi ekonomi saat ini," kata Nafif.

Menurut Nafif, kebijakan tersebut perlu diterjemahkan melalui penguatan ekonomi lokal dan perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang menjadi penopang perekonomian daerah, seperti petani, nelayan, dan pelaku UMKM.

"Pidato Presiden Prabowo di HUT ke-81 RI memberikan peta jalan (roadmap) ekonomi yang sangat kokoh. Fokus beliau pada kedaulatan pangan, penguatan industri lokal, serta perlindungan terhadap petani dan nelayan adalah kunci utama ketahanan ekonomi nasional yang harus kita dukung penuh di daerah," ujarnya.

Nafif menegaskan DPRD Jatim siap mengawal implementasi kebijakan ekonomi tersebut di tingkat regional. Pengawasan terhadap kebijakan fiskal dan sektor ekonomi, menurutnya, harus diarahkan agar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

"Kami di DPRD Jatim berkomitmen mengawal kebijakan fiskal dan pengawasan sektor ekonomi agar berpihak langsung kepada kesejahteraan rakyat kecil," pungkasnya. (adv,pra/dya)